



# PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Tanah Merah Sukadana

Fax : (0534) 770677

Kode Pos : 78852

### PENGUMUMAN

NOMOR : 810/3037 / BKPSDM-I.A

#### TENTANG

### SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 2022 Tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, maka Pemerintah Kabupaten Kayong Utara akan melaksanakan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 dengan rincian formasi sebagaimana terlampir pada **Lampiran I** pengumuman ini, adapun ketentuan pendaftaran sebagai berikut :

#### I. PERSYARATAN UMUM

##### A. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan;
2. Batas Usia untuk Pelamar Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Usia dimaksud merupakan usia pada saat pelamar mendaftar secara online, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

8. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
9. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi untuk 1 (satu) formasi jabatan dalam satu periode pendaftaran;
10. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi dan Program Studi yang Terakreditasi minimal 2,00 (dua koma nol nol);
11. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun berturut-turut di bidang kerja yang **relevan** dengan jabatan fungsional yang dilamar. Dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
  - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah.
  - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/ yayasan.
12. Selain memiliki persyaratan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun, pelamar harus memiliki persyaratan wajib tambahan untuk jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis.
13. Daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai dapat dilihat pada **Lampiran II**.

#### **B. Pelamar Penyandang Disabilitas**

1. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada jabatan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
2. Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
3. Pernyataan dibuktikan dengan :
  - a) dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.
  - b) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas jabatan yang akan dilamar.

## **II. DOKUMEN PERSYARATAN PELAMAR**

Dokumen persyaratan diunggah pada akun SSCASN pelamar adalah **scan asli berwarna (tidak hitam putih/grayscale)** dan **pelamar memastikan berkas yang diunggah dapat dibuka / file tidak rusak dan terbaca dengan jelas**. Adapun berkas yang perlu diunggah antara lain :

1. Pas foto terbaru berpakaian kemeja berlatar belakang merah;
2. Surat Lamaran sesuai format pada **Lampiran III**, yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani serta menggunakan *e-meterai* atau materai tempel Rp. 10.000,-;
3. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

4. Transkrip Nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan Akademik Asli;
5. Asli Surat Pernyataan 5 Poin diketik sesuai format pada Lampiran IV dan ditandatangani serta menggunakan *e-meterai* atau materai tempel Rp. 10.000,-;
6. Asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi yang belum memiliki e-KTP;
7. Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar;
8. Asli Surat Keterangan/Sertifikat Kompetensi untuk jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan;
9. Asli Sertifikat Kompetensi untuk jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan sertifikat kompetensi sebagai penambahan nilai.

### III. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 dapat melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat website Portal Sistem Seleksi CASN Nasional (SSCASN) 2022 <https://sscasn.bkn.go.id> dan dapat mengisi dan mengunggah dokumen sesuai yang diminta. Agar menjadi perhatian bahwa:
  - a. unggah dokumen harus sesuai pada Jenis Dokumen yang telah ditentukan, dengan hasil scan dokumen **asli (berwarna)** yang benar, yakni ukuran proporsional/tidak miring/tidak terbalik/tidak gelap/tidak buram;
  - b. segala bentuk salah unggah/unggah tertukar/berkas unggah tidak terbaca dapat dinyatakan dokumen tidak terlampir dan **merupakan tanggung jawab Pelamar**.
  - c. setelah selesai dapat mencetak Kartu/Tanda Bukti Pendaftaran SSCASN Tahun 2022 yang akan digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui SSCASN 2022.
2. Semua informasi atau data yang dicantumkan dalam formulir pendaftaran *online* harus diisi secara benar berdasarkan dokumen asli dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah.
4. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
5. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2022 dapat dilihat atau diunduh dilaman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bkpsdmkku.id>.

### IV. TAHAPAN SELEKSI

Pada seleksi penerimaan PPPK JF Teknis terdiri dari dua tahap yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pada seleksi kompetensi materi yang dinilai antara lain :

1. Seleksi Administrasi  
Dilakukan dengan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamar.
2. Seleksi Kompetensi dan wawancara

Seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan dengan menilai kesesuaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, penilaian integritas dan moralitas yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan menggunakan metode *Computer Assisted Test (CAT)*.

## V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CASN Tahun 2022;
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang dan/atau dalam bentuk lain;
3. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusan peserta karena kecurangan/pelangaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan kelulusannya akan dinyatakan gugur/dibatalkan;
4. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi ASN Tahun 2022 hanya dapat dilihat dalam situs online <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bkpsdmkku.id>;
5. **Apabila pelamar tidak bisa mendaftarkan terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar ataupun terjadi perbedaan/kesalahan data kependudukan, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;**
6. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada proses tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi ASN, maka Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
7. Seluruh tahapan seleksi Penerimaan CASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.

## VI. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 s.d 3 Januari 2023
2	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023
3	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d 15 Januari 2023
5	Masa Sanggah	16 s.d 18 Januari 2023
6	Jawab Sanggah	19 s.d 25 Januari 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d 28 Januari 2023

8	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d 22 Februari 2023
9	Penarikan Data Final	23 s.d 24 Februari 2023
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d 1 Maret 2023
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	2 s.d 7 Maret 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d 3 April 2023
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	20 Maret s.d 6 April 2023
14	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret s.d 8 April 2023
15	Pengumuman Kelulusan	9 s.d 11 April 2023
16	Masa Sanggah	12 s.d 14 April 2023
17	Jawab Sanggah	14 s.d 20 April 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d 29 April 2023
19	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d 22 Mei 2023
20	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei s.d 20 Juni 2023

Catatan:

1. apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <http://bkpsdmkku.id>;
2. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau perkembangan informasi dan pengumuman penting lainnya.

Sukadana, 21 Desember 2022

a.n. BUPATI KAYONG UTARA  
Sekretaris Daerah,



**Dra. HILARIA YUSNANI**

Pembina Utama Madya

NIP. 19630518 198403 2 010

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Kalimantan Barat cq Kepala BKD Provinsi Kalimantan Barat;
5. Bupati Kayong Utara;
6. Kepala Kanreg V BKN.

Lampiran I : Pengumuman Sekretaris Daerah  
 Nomor : 810 / 3037 / BKPSDM-I.A  
 Tanggal : 21 Desember 2022  
 Tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022

**PENETAPAN KEBUTUHAN PPPK JF TENAGA TEKNIS  
 DI LINGKUNGAN PEMERITAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
			JUMLAH	171	
1	AHLI PERTAMA - ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF	S-1/D-IV PARIWISATA / S-1 ILMU HUKUM / D-IV ILMU HUKUM	5	1	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA, BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	S-1/D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 PLANOLOGI / D-IV ILMU HUKUM	5	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEPALA SEKSI REHABILITASI DAN REKONTRUKSI
3	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	2	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, BAGIAN PEMERINTAHAN
5	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	1	SEKRETARIAT DPRD, BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN
6	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	3	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, BAGIAN ORGANISASI
7	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1/D-IV PENYULUH PERTANIAN / S-1 ARGOTEKNOLOGI / S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN / D-IV ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN	5	1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN, BIDANG KETAHANAN PANGAN
8	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	S-1 AGRIBISNIS / D-IV AGRIBISNIS / S-1 AGRONOMI / D-IV AGRONOMI	5	1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN, BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PERTANIAN
9	AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	S-1 / D-IV TEKNIK SIPIL	5	1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN, BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PERTANIAN
10	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	5	1	SEKRETARIAT DPRD, BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN, KEPALA SUBBAGIAN UMUM
11	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU PEMERINTAHAN	5	1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP, SEKRETARIS, KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
12	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	5	1	INSPEKTORAT DAERAH, SEKRETARIS, KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
13	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU PEMERINTAHAN	5	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SEKRETARIS, SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
14	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, SEKRETARIS, SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
15	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, SEKRETARIS, SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
16	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, SEKRETARIS, KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
17	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	DINAS PENDIDIKAN, SEKRETARIS, SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
18	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	5	3	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI, DISIPLIN, PENGHARGAAN, DAN FASILITASI PROFESI ASN
19	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ADMINISTRASI PUBLIK	5	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KEPALA BIDANG PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, MUTASI DAN PROMOSI, KEPALA SUBBIDANG MUTASI, PROMOSI DAN PENGEMBANGAN KARIR
20	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, BAGIAN UMUM
21	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU PEMERINTAHAN	5	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, SEKRETARIS, KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
22	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN	5	1	BADAN KEUANGAN DAERAH, SEKRETARIS, KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
23	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN	5	1	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, SEKRETARIS, KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
24	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN	5	1	DINAS PEHUBUNGAN, SEKRETARIS, SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
25	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 KEARSIPAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV KEARSIPAN / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	2	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, BIDANG KEARSIPAN
26	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN	5	1	DINAS PENDIDIKAN, SEKRETARIS, SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
27	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN	5	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, SEKRETARIS, SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
28	AHLI PERTAMA - PELATIH OLAHRAGA	S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA / D-IV PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA	5	1	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA, BIDANG OLAHRAGAAN
29	AHLI PERTAMA - PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 BUDIDAYA PERAIRAN / D-IV BUDIDAYA PERAIRAN / S-1 ILMU KELAUTAN / D-IV ILMU KELAUTAN / S-1 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN / D-IV TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	5	1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
30	AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	S-1 / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU SOSIATRI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN NASIONAL / D-IV ILMU SOSIATRI / D-IV ILMU POLITIK / D-IV ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL	5	1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BIDANG TENAGA KERJA
31	AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	S-1 / D-IV TEKNIK MESIN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN	5	1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN, BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PERTANI
32	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	S-1 PETERNAKAN / D-IV PETERNAKAN	5	1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN, BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
33	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN / D-IV ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN	5	2	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN, BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
34	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN / D-IV ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN	5	1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN, BIDANG PERKEBUNAN
35	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	S-1 ILMU HUKUM	5	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, KEPALA SEKSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN III
36	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	S-1 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN / D-IV TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	5	1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, BIDANG PERIKANAN TANGKAP

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
37	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU POLITIK / D-IV ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU PEMERINTAHAN	5	3	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
38	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU POLITIK / D-IV ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU PEMERINTAHAN	5	3	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, BIDANG PEMERINTAH DESA
39	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV ILMU POLITIK / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU KOMUNIKASI	5	1	KECAMATAN TELUK BATANG, SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
40	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV ILMU POLITIK / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU KOMUNIKASI	5	1	KECAMATAN KEPULAUAN KARIMATA, SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
41	AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM	S-1 ILMU HUKUM	5	1	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN PEMERINTAHAN DAN SEJAHTERAAN RAKYAT, BAGIAN HUKUM
42	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 / D-IV PENYULUH PERTANIAN / S-1 AGRIBISNIS / D-IV AGRIBISNIS / S-1 PERTERNAKAN / S-1 TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA / D-IV AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA / S-1 PERKEBUNAN / D-IV PERKEBUNAN	5	10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN, BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN, KEPALA SEKSI KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN
43	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 / D-IV PENYULUH PERTANIAN / S-1 AGROTEKNOLOGI / D-IV AGROTEKNOLOGI / S-1 AGRIBISNIS / D-IV AGRIBISNIS	5	10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN, BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN
44	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	S-1 PSIKOLOGI / D-IV PSIKOLOGI / S-1 SOSIOLOGI / D-IV SOSIOLOGI / S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL / D-IV PEMBANGUNAN SOSIAL	5	2	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
45	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	S-1 PSIKOLOGI / D-IV PSIKOLOGI / S-1 SOSIOLOGI / D-IV SOSIOLOGI / S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL / D-IV PEMBANGUNAN SOSIAL	5	2	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, BIDANG SOSIAL
46	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 / D-IV AKUNTANSI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / S-1 / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	5	1	SEKRETARIAT DPRD, BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
47	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 / D-IV AKUNTANSI / S-1 / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU PEMERINTAHAN	5	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, SEKRETARIS
48	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 / D-IV AKUNTANSI / S-1 / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN	5	1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN, SEKRETARIS
49	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 / D-IV AKUNTANSI / S-1 / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU PEMERINTAHAN	5	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
50	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 / D-IV AKUNTANSI / S-1 / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	5	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, SEKRETARIS



NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
51	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 / D-IV AKUNTANSI / S-1 / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	5	1	DINAS PENDIDIKAN, SEKRETARIS
52	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 / D-IV AKUNTANSI / S-1 / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU PEMERINTAHAN	5	2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
53	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 / D-IV AKUNTANSI / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	5	1	DINAS PERDAGANGAN, SEKRETARIS, KEPALA SUBBAGIAN RENCANA KERJA DAN KEUANGAN
54	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 / D-IV AKUNTANSI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	5	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, SEKRETARIS, SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
55	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 / D-IV AKUNTANSI S-1 / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	5	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, SEKRETARIS
56	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 / D-IV AKUNTANSI S-1 / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	5	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, SEKRETARIS, KEPALA SUBBAGIAN RENCANA KERJAJAN KEUANGAN
57	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 / D-IV AKUNTANSI S-1 / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	5	1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP, SEKRETARIS, KEPALA SUBBAGIAN RENCANA KERJA DAN PIUANGAN
58	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 / D-IV AKUNTANSI / S-1 / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	5	1	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, SEKRETARIS
59	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 / D-IV AKUNTANSI / S-1 / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	5	1	DINAS PENDIDIKAN, SEKRETARIS, SUBBAGIAN RENCANA KERJA, MONITORING DAN EVALUASI
60	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 / D-IV AKUNTANSI / S-1 / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA	5	1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, SEKRETARIS
61	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 / D-IV AKUNTANSI / D-IV ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	5	1	DINAS PEHUBUNGAN, SEKRETARIS, SUBBAGIAN RENCANA KERJA DAN KEUANGAN
62	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 / D-IV AKUNTANSI / S-1 / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN	5	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SEKRETARIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
63	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 / D-IV AKUNTANSI / S-1 / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	5	1	INSPEKTORAT DAERAH, SEKRETARIS
64	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 / D-IV PEMERINTAHAN / S-1 / D-IV EKONOMI MANAJEMEN / S-1 / D-IV AKUNTANSI / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	5	1	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, SEKRETARIS, KEPALA SUBBAGIAN RENCANA KERJA, MONITORING DAN EVALUASI
65	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK / D-IV ILMU KOMUNIKASI / D-IV ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU POLITIK	5	2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
66	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU POLITIK / D-IV ILMU POLITIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ILMU PEMERINTAHAN	5	2	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
67	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM KOMPUTER / D-IV SISTEM KOMPUTER / S-1 / D-IV TEKNIK KOMPUTER	5	1	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
68	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 / D-IV TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / D-IV SISTEM KOMPUTER	5	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN DATA, APLIKASI DAN STATISTIK
69	AHLI PERTAMA - SURVEYOR PEMETAAN	D-IV MANAJEMEN PERTANAHAN / S-1 PLANOLOGI / D-IV PLONALOGI / S-1 PERENCANA WILAYAH DAN KOTA / D-IV PERENCANA WILAYAH DAN KOTA	5	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, BIDANG PENATA RUANG DAN JASA KONSTRUKSI, KEPALA SEKSI PERTANAHAN
70	AHLI PERTAMA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	S-1 / D-IV TEKNIK SIPIL	5	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, BIDANG BINA MARGA
71	AHLI PERTAMA - TEKNIK PENGAIRAN	S-1 / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK PENGAIRAN / D-IV TEKNIK PENGAIRAN / S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR / D-IV TEKNIK SUMBER DAYA AIR	5	2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, BIDANG SUMBER DAYA AIR
72	AHLI PERTAMA - TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	S-1 / D-IV TEKNIK LINGKUNGAN	5	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, BIDANG CIPTA KARYA
73	AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	S-1 / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 / D-IV ARSITEKTUR	5	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, BIDANG CIPTA KARYA
74	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMA / SMK	5	5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEPALA SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK
75	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMA / SMK	5	5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
76	PEMULA - PENGAMAT TERA	SMA IPA	5	3	DINAS PERDAGANGAN, BIDANG PERDAGANGAN
77	PEMULA - PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN	SMK PERIKANAN	5	5	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
78	TERAMPIL - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	D-III TEKNOLOGI PERTANIAN / D-III TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN / D-III BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN	5	2	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN, BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
79	TERAMPIL - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	D-III TEKNOLOGI PERTANIAN / D-III BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN / D-III TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN	5	1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN, BIDANG PERKEBUNAN
80	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN DAN INFORMATIKA KOMPUTER / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN PERUSAHAAN / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI	5	1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, SEKRETARIS, SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
81	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN DAN INFORMATIKA KOMPUTER / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN PERUSAHAAN / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI	5	2	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, BIDANG KEARSIPAN
82	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN PERUSAHAAN / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI	5	1	INSPEKTORAT DAERAH, SEKRETARIS, KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
83	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN PERUSAHAAN / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI	5	1	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, BAGIAN UMUM
84	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	5	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SEKRETARIS, KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
85	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	5	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, SEKRETARIS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
86	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN PERUSAHAAN / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI	5	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, SEKRETARIS, KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
87	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN PERUSAHAAN / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI	5	1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, SEKRETARIS, SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
88	TERAMPIL - ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	D-III TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN / D-III BUDIDAYA PERIKANAN	5	2	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
89	TERAMPIL - ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF	D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN PERUSAHAAN	5	1	SEKRETARIAT DPRD, BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
90	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA	5	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, KEPALA SEKSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
91	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	5	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
92	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III PETERNAKAN / D-III KESEHATAN HEWAN	5	1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN, BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
93	TERAMPIL - PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN	D-III BUDIDAYA PERIKANAN	5	2	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
94	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III TEKNOLOGI PERTANIAN / D-III AGROINDUSTRI	5	5	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN, BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN
95	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III BUDIDAYA PERTANIAN / D-III TEKNOLOGI PERTANIAN / D-III AGROINDUSTRI	5	5	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN, BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN, KEPALA SEKSI KETENAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN
96	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III KOMPUTER	5	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK, KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR, TEKNOLOGI DAN PERSANDIAN
97	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	5	1	SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, BAGIAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
98	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA	5	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, BIDANG PEGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
99	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	5	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI, DISIPLIN, PENGHARGAAN, DAN FASILITASI PROFESI ASN
100	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III ILMU PEMERINTAHAN	5	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SEKRETARIS, KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
101	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	5	2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, KEPALA BIDANG PENGADAAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, MUTASI DAN PROMOSI
102	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5	1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, SEKRETARIS, KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
103	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III KOMPUTER	5	1	DINAS PERDAGANGAN, SEKRETARIS, KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR
104	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI PERKANTORAN	5	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, SEKRETARIS
105	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	5	1	DINAS PEHUBUNGAN, SEKRETARIS, SUBBAGIAN UMUM DAN APARATUR

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1	2	3	4	5	6
106	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN	5	2	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, BIDANG PERPUSTAKAAN
107	TERAMPIL - TEKNIK PENGAIRAN	D-III TEKNIK SIPIL	5	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, BIDANG SUMBER DAYA AIR
108	TERAMPIL - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	D-III TEKNIK SIPIL / D-III ARSITEKTUR	5	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, BIDANG CIPTA KARYA


  
 a.n. BUPATI KAYONG UTARA  
 Sekretaris Daerah,  
  
**Dra. HILARIA YUSNANI**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19630518 198403 2 010

Lampiran II : Pengumuman Sekretaris Daerah  
 Nomor : 810 / 3037 / BKPSDM-I.A  
 Tanggal : 21 Desember 2022  
 Tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah  
 dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional  
 Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
 Kayong Utara Tahun 2022

**DAFTAR JENIS JABATAN FUNSIONAL YANG MEMERLUKAN PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN  
 DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI TAMBAHAN NILAI**

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/ JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Teknik Jalan dan Jembatan	Ahli Pertama		Sertifikasi Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Sipil Jalan dan Jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), antara lain: 1. Ahli Teknik Jalan 2. Ahli Teknik Jembatan 3. Ahli Keselamatan Jalan 4. Ahli Teknik Terowongan 5. Ahli Teknik Geoteknik 6. Ahli Teknik Geodesi	15%	
		Terampil		Sertifikasi Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Sipil Jalan dan Jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), antara lain: 1. Ahli Teknik Jalan 2. Ahli Teknik Jembatan 3. Ahli Keselamatan Jalan 4. Ahli Teknik Terowongan 5. Ahli Teknik Geoteknik 6. Ahli Teknik Geodesi	15%	
2	Penyuluh Sosial	Ahli Pertama		Sertifikat kompetensi Penyuluh Sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial	25%	
3	Pustakawan	Terampil		Sertifikat kompetensi kerja Pustakawan masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan	15%	
		Ahli Pertama		Sertifikat kompetensi kerja Pustakawan masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan	5%	
4	Pemadam Kebakaran	Pemula	Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas	Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri	25%	Jenis sertifikat kompetensi sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah, diantaranya: 1. Pemadam 1; 2. Pemadam 2; 3. Pemadam 3; 4. Montir Mobil Kebakaran; atau 5. Caraka Mobil Kebakaran.
				Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12,5%	
				Jenis sertifikat lainnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani minimal oleh Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah atau Kepala Divisi SDM pada instansi lainnya	5%	
		Trampil	Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas	Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri	25%	Jenis sertifikat kompetensi sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/ JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
1	2	3	4	5	6	7
				Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12,5%	Kebakaran di Daerah, diantaranya: 1. Pemadam 1; 2. Pemadam 2; 3. Pemadam 3; 4. Montir Mobil Kebakaran; atau 5. Caraka Mobil Kebakaran.
				Jenis sertifikat lainnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani minimal oleh Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah atau Kepala Divisi SDM pada instansi lainnya	5%	Sertifikat kompetensi berupa: 1. Diktat Penyelamatan (Rescue); atau 2. Diklat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
5	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Ahli Pertama		Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%	
6	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	Ahli Pertama		Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%	
7	Penyuluh Pertanian	Ahli Pertama		Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%	
		Terampil		Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%	


 a.n. BUPATI KAYONG UTARA  
 Sekretaris Daerah,  
  
**Dra. HILARIA YUSNANI**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19630518 198403 2 010

Lampiran III : Pengumuman Sekretaris Daerah  
Nomor : 810 / 3037 / BKPSDM-I.A  
Tanggal : 21 Desember 2022  
Tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022

**FORMAT SURAT LAMARAN**

....., .... Desember 2022

KEPADA

HAL : LAMARAN UNTUK MENGIKUTI TES PPPK  
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
FORMASI TAHUN 2022

YTH. BUPATI KAYONG UTARA

DI-  
SUKADANA

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

NAMA :  
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR :  
- KECAMATAN :  
- KABUPATEN :  
- PROVINSI :  
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) :  
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI/PEREMPUAN(\*)  
AGAMA :  
STATUS PERKAWINAN : KAWIN/BELUM KAWIN/JANDA/DUDA(\*)  
PENDIDIKAN / JURUSAN :  
ALAMAT : *DITULIS LENGKAP DENGAN MENCANTUMKAN  
KOTA, PROVINSI DAN KODE POS*  
ALAMAT E-MAIL :  
NOMOR WHATSAPP :  
NAMA JABATAN YANG DILAMAR (\*\*):  
NO. TELP / HP :

MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK UNTUK DAPAT MENGIKUTI UJIAN PENERIMAAN PPPK PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA FORMASI TAHUN 2022. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN UNGGAH DOKUMEN DALAM BENTUK SCAN SEBAGAI BERIKUT:

1. PAS FOTO TERBARU BERLATAR BELAKANG WARNA MERAH;
2. ASLI IJAZAH;
3. ASLI TRANSKRIP NILAI;
4. ASLI KARTU TANDA PENDUDUK ATAU SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PEREKAMAN KEPENDUDUKAN YANG DIKELUARKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
5. SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POIN METERAI RP. 10.000,-
6. SURAT KETERANGAN DOKTER YANG MENERANGKAN JENIS DAN DERAJAT KEDISABILITASANNYA SERTA UNGGAH VIDEO SINGKAT YANG MENUNJUKKAN KEGIATAN SEHARI-HARI DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS SESUAI JABATAN YANG AKAN DILAMAR (BAGI PELAMAR DISABILITAS)

DEMIKIAN PERMOHONAN INI SAYA SAMPAIKAN DAN ATAS PERKENAN BAPAK SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

meterai  
Rp. 10.000,-

Hormat saya,

(Nama Lengkap)

Catatan :

(\*) Pilih dan tulis salah satu

(\*\*) Pelamar hanya dapat menuliskan 1 instansi, 1 formasi dan 1 jabatan yang dipilih sesuai dengan pada instansi yang dilamar.

\*\*\*) Jika penulisan tidak cukup pada satu halaman dapat dilanjutkan pada halaman ketiga kertas folio.

a.n. BUPATI KAYONG UTARA  
Sekretaris Daerah,  
  
**Dra. HILARIA YUSNANI**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630518 198403 2 010

Lampiran IV : Pengumuman Sekretaris Daerah  
Nomor : 810 / 3037 / BKPSDM-I.A  
Tanggal : 21 Desember 2022  
Tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022

**FORMAT SURAT PERNYATAAN**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Agama :  
Alamat :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
5. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....  
Yang membuat pernyataan,

meterai  
Rp. 10.000,-

.....  
  
a.n. BUPATI KAYONG UTARA  
Sekretaris Daerah,  
**Dra. HILARIA YUSNANI**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630518 198403 2 010



SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA 1)  
Nomor:...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

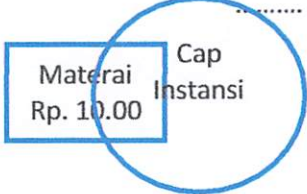
Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Pendidikan :  
Unit Kerja/Instansi :

Telah melaksanakan tugas sebagai ..... selama ..... tahun ..... bulan, terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... dan berkinerja baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... Desember 2022  
Jabatan  
  
(ttd)  
Nama